



## MENGUNGKAP INTERAKSI ANTARA TATA KELOLA PERUSAHAAN, MANAJEMEN LABA, DAN STRATEGI PENGHINDARAN PAJAK

**Lintang Putri Estiarto**

Universitas Bina Insani, Bekasi, Indonesia

[\\*lintangputri@binainsani.ac.id](mailto:lintangputri@binainsani.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### **Histori Artikel**

Tanggal Submit

Tanggal revisi

Tanggal Accepted

#### **Key words:**

Corporate Governance, Earnings Management, Tax Avoidance

10.36805/vapbxz04 Open

access under Creative

Common Attribution



### ABSTRACT

*This study investigates the intricate relationships between corporate governance structures, earnings management, and tax avoidance strategies within Indonesian listed companies. Utilizing a dataset of 200 firms from the Indonesia Stock Exchange over the period 2018-2020, we explore how different ownership types – specifically institutional, insider, and blockholder ownership – affect corporate tax behavior and accounting practices. Our regression analysis reveals that insider ownership correlates with less aggressive tax avoidance, suggesting an alignment of interests with long-term corporate health rather than short-term gains. Conversely, institutional ownership did not significantly affect tax strategies, indicating a complex interplay between investor types and corporate tax policies. Blockholder ownership showed a varied influence, hinting at the importance of the nature of blockholder involvement in governance. Furthermore, the study examines earnings management through discretionary accruals, finding no significant impact on tax avoidance, which challenges conventional assumptions about the alignment of earnings management with tax minimization strategies. The findings underscore the nuanced roles that different ownership structures play in shaping corporate governance and financial strategies. The research contributes to the ongoing debate on the effectiveness of corporate governance in curbing aggressive tax practices and provides empirical evidence to inform policy and practice in emerging markets.*

### ABSTRAK

Penelitian ini menguji hubungan antara tata kelola perusahaan, manajemen laba, dan strategi penghindaran pajak pada perusahaan publik di Indonesia. Menggunakan data dari 200 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2018-2020, penelitian ini menganalisis pengaruh jenis kepemilikan – institusional, internal, dan blok – terhadap perilaku pajak dan praktik akuntansi perusahaan. Hasil regresi menunjukkan bahwa kepemilikan internal berkorelasi dengan penghindaran pajak yang lebih rendah, menandakan keselarasan kepentingan dengan kesehatan jangka panjang perusahaan. Sebaliknya, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap strategi pajak, sementara kepemilikan blok menunjukkan pengaruh yang bervariasi tergantung pada tingkat keterlibatan pemegang saham. Selain itu, analisis terhadap manajemen laba melalui akrual diskresioner menemukan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, menantang asumsi bahwa keduanya saling terkait. Temuan ini menegaskan bahwa struktur kepemilikan memiliki peran penting dalam membentuk tata kelola dan strategi keuangan perusahaan, serta memberikan bukti empiris bagi upaya peningkatan efektivitas tata kelola dalam menekan praktik penghindaran pajak di pasar negara berkembang.

## **1. Pendahuluan**

Perencanaan pajak tetap menjadi topik penting di Indonesia, di mana penelitian mengenai hal ini masih terbatas. Pemerintah Indonesia sangat bergantung pada penerimaan pajak, terutama di tengah perubahan kondisi pasar global. Pentingnya pajak sebagai sumber utama pendapatan negara menegaskan perlunya penelitian berkelanjutan untuk memahami dinamika antara struktur kepemilikan perusahaan dan manajemen laba dalam konteks penghindaran pajak. Penelitian terbaru menegaskan relevansi isu ini dalam konteks negara berkembang. Guo dan Sapiei (2024) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan berperan penting dalam menekan penghindaran pajak, sedangkan Thai, Dang, Mohd Nor, dan Nguyen (2023) menemukan bahwa mekanisme pengawasan yang kuat mampu mengurangi praktik pajak agresif di Asia Tenggara.

Teori yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) tentang perilaku manajerial dan biaya keagenan dalam struktur kepemilikan menjadi dasar teoretis yang kuat untuk analisis ini. Pemahaman tersebut diperluas oleh penelitian Lim (2020) yang menunjukkan hubungan antara penghindaran pajak, biaya utang, dan aktivisme pemegang saham di Korea, yang mengindikasikan bahwa dinamika serupa mungkin terjadi di Indonesia. Namun, penelitian terkini di konteks negara berkembang menunjukkan hasil yang beragam. Amri (2023) dan Tandean dan Winnie (2024) menemukan bahwa kepemilikan manajerial justru dapat meningkatkan penghindaran pajak ketika mekanisme pengawasan belum optimal. Penelitian Modigliani dan Miller (1958), yang menyempurnakan teori sebelumnya mengenai pajak penghasilan perusahaan dan biaya modal, juga memberikan landasan untuk memahami dampak perubahan regulasi pajak terhadap keputusan pendanaan dan pengelolaan pajak perusahaan. Melalui tinjauan literatur ini, studi ini berupaya memberikan wawasan yang lebih luas dan kontekstual tentang pengaruh struktur kepemilikan dan manajemen laba terhadap praktik penghindaran pajak di Indonesia.

Meskipun literatur yang ada, seperti Anderson et al. (2019) dan Guenther dan Young (2018), telah membahas implikasi struktur kepemilikan dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada ekonomi Barat dan perusahaan besar. Selain itu, penelitian terbaru (Velte, 2023; Riedl & Selim, 2024) menunjukkan bahwa pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak tidak seragam, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik pasar dan kualitas tata kelola di masing-masing negara. Masih terdapat kesenjangan penelitian dalam konteks Indonesia, di mana tata kelola perusahaan dan regulasi pajak memiliki karakteristik yang berbeda. Fluktuasi ekonomi dan perubahan regulasi pada periode 2018–2020 juga memberikan peluang untuk mengkaji bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi perilaku perusahaan dalam perencanaan pajak dan manajemen laba di konteks non-Barat.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan bukti empiris yang dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dan pemimpin korporasi dalam menciptakan praktik perpajakan yang lebih transparan dan efisien sesuai dengan standar internasional. Dengan mengisi kesenjangan penelitian ini, studi ini berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan mengenai strategi penghindaran pajak perusahaan di pasar negara berkembang, serta memberikan wawasan penting bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara tata kelola perusahaan, manajemen laba, dan perencanaan pajak di Indonesia.

## **2. Tinjauan Pustaka**

Literatur terkini menunjukkan bahwa hubungan antara struktur kepemilikan, manajemen laba, dan penghindaran pajak bersifat kompleks dan saling memengaruhi. Dasar konseptual utama dari hubungan ini bersumber dari Teori Keagenan (Agency Theory) dan Teori Stewardship, yang menjelaskan perbedaan perilaku manajerial dalam pengelolaan laba dan

strategi penghindaran pajak. Kedua teori ini memberikan kerangka konseptual yang saling melengkapi. *Agency Theory* berfokus pada konflik kepentingan antara pemilik dan manajer serta pentingnya mekanisme pengawasan dan insentif, sedangkan *Stewardship Theory* menekankan nilai kepercayaan, tanggung jawab, dan orientasi jangka panjang dalam tata kelola perusahaan (Kolawole & Igbekoyi, 2025; Velte, 2023). Integrasi kedua teori tersebut penting untuk memahami bagaimana struktur kepemilikan dan perilaku manajerial berpengaruh terhadap kebijakan pajak perusahaan publik di Indonesia.

Menurut *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976), hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) sering kali diwarnai konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan dan asimetri informasi. Manajer memiliki kecenderungan memaksimalkan utilitas pribadi, termasuk melalui praktik penghindaran pajak, untuk meningkatkan laba jangka pendek dan kompensasi pribadi (Gaba & Velte, 2024). Peningkatan kepemilikan manajerial berfungsi sebagai mekanisme penyelarasan (*alignment mechanism*) antara manajer dan pemegang saham sehingga dapat menurunkan perilaku oportunistik, termasuk agresivitas pajak (Wongsinhirun et al., 2024).

Hasil tinjauan literatur oleh Velte (2023) menunjukkan bahwa dalam dekade terakhir, bukti empiris konsisten mendukung pandangan bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mengurangi penghindaran pajak melalui peningkatan efektivitas pengawasan internal. Namun, pada konteks kepemilikan terkonsentrasi seperti di Indonesia, *Agency Theory* juga menjelaskan efek ganda (*dual effects*). Carbone, Manzi, Cirillo, dan Sciascia (2025) menunjukkan bahwa kepemilikan dominan pada perusahaan keluarga dapat menurunkan agresivitas pajak melalui pengawasan ketat, tetapi dapat pula menimbulkan efek *entrenchment*, yaitu ketika pemilik mayoritas menggunakan kekuasaan mereka untuk memaksimalkan keuntungan pribadi melalui strategi penghindaran pajak. Dengan demikian, *Agency Theory* memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menjelaskan variasi perilaku pajak perusahaan berdasarkan keseimbangan antara mekanisme insentif, pengawasan, dan struktur kepemilikan.

Sebaliknya, *Stewardship Theory* memandang manajer sebagai pelindung (*steward*) yang berorientasi pada kepentingan organisasi jangka panjang dan kesejahteraan pemangku kepentingan (Donaldson & Davis, 1991). Dalam pandangan ini, pengawasan berbasis kepercayaan dan tanggung jawab moral lebih efektif dalam mendorong kepatuhan pajak dibandingkan pengawasan berbasis hukuman atau kontrol eksternal (Kolawole & Igbekoyi, 2025).

Kedua teori tersebut memberikan perspektif yang komplementer dalam menjelaskan perilaku penghindaran pajak. *Agency Theory* menjelaskan bagaimana kepemilikan manajerial dan mekanisme insentif dapat menekan perilaku oportunistik, sedangkan *Stewardship Theory* menekankan pentingnya nilai tanggung jawab moral dan orientasi jangka panjang dalam mendorong kepatuhan pajak (Kolawole & Igbekoyi, 2025; Wongsinhirun et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, di mana kepemilikan perusahaan cenderung terkonsentrasi dan fungsi pengawasan eksternal masih lemah, kombinasi kedua teori ini memberikan kerangka konseptual yang lebih seimbang. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kedua teori tersebut untuk menjelaskan bagaimana struktur kepemilikan dan manajemen laba berinteraksi dalam menentukan strategi penghindaran pajak perusahaan publik di Indonesia.

## 2.1. Pengembangan Hipotesis

### Kepemilikan Internal (Insider Ownership) dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan internal dijelaskan melalui kerangka *Agency Theory*, yang menekankan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh manajer, semakin selaras kepentingan mereka dengan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Keselarasan tersebut dapat mengurangi kecenderungan manajer melakukan tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak yang agresif. Studi pada pasar Asia menunjukkan bahwa meningkatnya kepemilikan internal

berhubungan dengan strategi perpajakan yang lebih konservatif (Kim et al., 2023).

Penelitian lain mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial substansial mendorong perilaku kehati-hatian dan orientasi jangka panjang dalam kebijakan keuangan perusahaan (Hartmann & Hassan, 2021). Secara keseluruhan, kepemilikan internal yang besar dapat menekan tingkat penghindaran pajak melalui peningkatan tanggung jawab manajerial terhadap keberlanjutan perusahaan (Wongsinhirun et al., 2024).

**H<sub>1</sub>: Kepemilikan internal berpengaruh negatif terhadap tingkat penghindaran pajak.**

### **Kepemilikan Institusional (Institutional Ownership) dan Penghindaran Pajak**

Kepemilikan institusional membawa tekanan tata kelola tambahan karena lembaga keuangan dan investor besar umumnya memiliki tanggung jawab fidusia dan reputasi publik yang harus dijaga. Tekanan dari investor institusional mendorong praktik keuangan yang lebih transparan dan etis, termasuk dalam kebijakan perpajakan (Patel & Patel, 2024). Perusahaan dengan kepemilikan institusional tinggi lebih patuh terhadap peraturan pajak karena pengawasan yang kuat dan tuntutan akuntabilitas (Jackson, Markarian, & Gross, 2022). Selain itu, kepemilikan institusional yang aktif dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak melalui penguatan fungsi pengawasan (Athira & Lukose, 2023).

**H<sub>2</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.**

### **Kepemilikan Blok (Blockholder Ownership) dan Penghindaran Pajak**

Kepemilikan blok terjadi ketika sebagian besar saham dipegang oleh pemegang saham besar yang memiliki kemampuan memengaruhi kebijakan perusahaan. Blockholder aktif dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen, termasuk penghindaran pajak (Zhao & Chen, 2022). Namun, dampak kepemilikan blok bergantung pada sejauh mana blockholder terlibat secara aktif dalam pengawasan, bukan sekadar berperan sebagai investor pasif (Long et al., 2024). Blockholder yang memiliki kepentingan jangka panjang juga cenderung mendorong praktik pelaporan yang lebih berkualitas dan menghindari manipulasi laba (Simmons & Nejadmalayeri, 2023).

**H<sub>3</sub>: Kepemilikan blok berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, tergantung pada tingkat keterlibatan blockholder dalam manajemen perusahaan.**

### **Akrual Diskresioner (Discretionary Accruals) dan Penghindaran Pajak**

Manajemen laba melalui akrual diskresioner menggambarkan fleksibilitas pelaporan akuntansi yang dapat digunakan untuk mengelola beban pajak. Reformasi pajak perusahaan mendorong perusahaan menyesuaikan kebijakan akrual untuk mengoptimalkan beban pajak (Guenther & Young, 2018). Dalam lingkungan dengan pengawasan ketat, akrual diskresioner juga digunakan untuk menyesuaikan laba dengan ekspektasi fiskal (Subramanian & Gopalakrishnan, 2024). Oleh karena itu, akrual diskresioner dapat menjadi sarana strategis dalam pengelolaan kewajiban pajak (Kothari & Lester, 2023).

**H<sub>4</sub>: Akrual diskresioner berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak.**

### **Manajemen Laba Riil (Real Earnings Management) dan Penghindaran Pajak**

Berbeda dari manajemen laba berbasis akrual, manajemen laba riil dilakukan melalui penyesuaian aktivitas operasional seperti percepatan penjualan, pengurangan biaya diskresioner, atau peningkatan produksi. Perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi lebih

sering menggunakan strategi ini untuk menekan laba kena pajak (Lee & Park, 2023). Strategi tersebut memang dapat menurunkan beban pajak dalam jangka pendek, tetapi berisiko menurunkan efisiensi dan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

**H<sub>5</sub>: Manajemen laba riil berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

### **Integrasi Struktur Kepemilikan dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak**

Kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik manajemen laba, baik melalui pendekatan akrual maupun melalui aktivitas operasional riil—sangat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan (Nguyen et al., 2024). Perusahaan dengan kepemilikan institusional tinggi cenderung memiliki tata kelola yang lebih baik sehingga menurunkan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, kepemilikan yang terkonsentrasi atau didominasi oleh pemegang saham internal dapat menghasilkan perilaku yang berbeda tergantung pada orientasi pemilik terhadap laba jangka pendek. Kepemilikan perusahaan di Indonesia umumnya masih terpusat pada kelompok pengendali, sementara pengawasan eksternal belum sekuat di negara maju. Kondisi ini menjadikan kombinasi *Agency Theory* dan *Stewardship Theory* relevan untuk menjelaskan variasi hubungan antara kepemilikan, manajemen laba, dan penghindaran pajak (Velte, 2023).

**H<sub>6</sub>: Terdapat hubungan positif antara manajemen laba—baik melalui akrual maupun aktivitas riil—dan penghindaran pajak, yang dimoderasi oleh jenis struktur kepemilikan.**

## **3. Metode Penelitian**

### **3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kombinasi metode deskriptif dan eksplanatori. Pendekatan kuantitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menguji hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori dan hasil studi sebelumnya melalui analisis data numerik. Metode deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik setiap variabel yang diteliti, sedangkan metode eksplanatori digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan kausalitas antara struktur kepemilikan, manajemen laba, dan praktik penghindaran pajak. Tujuan utama dari rancangan penelitian ini adalah menilai pengaruh struktur kepemilikan dan manajemen laba terhadap tingkat penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2020.

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian meliputi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang waktu 2018 hingga 2020. Pemilihan sektor manufaktur dilakukan karena sektor ini berperan penting dalam kontribusi penerimaan pajak nasional dan memiliki karakteristik kompleks dalam pelaporan keuangan dan strategi pengelolaan pajak.

Sampel penelitian ditentukan dengan purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan meliputi:

1. Perusahaan manufaktur yang masih aktif terdaftar di BEI sepanjang 2018–2020.
2. Perusahaan yang menyediakan laporan tahunan dan laporan keuangan auditan lengkap selama periode tersebut.

- Perusahaan yang memiliki data yang dibutuhkan untuk variabel penelitian, meliputi kepemilikan saham, total aset, leverage, dan data perpajakan (ETR).

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 150 perusahaan yang memenuhi syarat dan dijadikan sampel penelitian.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang dikumpulkan dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya. Sumber utama data berasal dari laporan tahunan dan laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2018–2020. Data diunduh melalui laman resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) serta situs resmi masing-masing perusahaan.

Pemilihan data sekunder dilakukan karena tingkat reliabilitasnya tinggi, mengingat laporan keuangan tersebut telah melalui proses audit dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Penggunaan data ini memungkinkan analisis yang lebih objektif, konsisten, dan dapat diverifikasi, sehingga hasil penelitian memiliki validitas empiris yang kuat.

### 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini mengelompokkan variabel menjadi tiga kategori, yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel kontrol, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

| Jenis Variabel             | Nama Variabel                                  | Definisi Operasional                                                                                                                  | Indikator/Pengukuran                                                              | Sumber                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Variabel Dependen</b>   | Penghindaran Pajak                             | Upaya perusahaan dalam mengurangi beban pajak melalui strategi legal dan perencanaan pajak yang efisien                               | Effective Tax Rate (ETR) = $\frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ | Hanlon & Heitzman (2023); Chen et al. (2010)  |
| <b>Variabel Independen</b> | Kepemilikan Internal                           | Persentase saham yang dimiliki oleh manajer, direksi, atau komisaris dalam perusahaan                                                 | Jumlah saham manajemen / Total saham beredar                                      | Kim et al. (2023); Wongsinhirun et al. (2024) |
|                            | Kepemilikan Institusional                      | Persentase saham yang dimiliki oleh lembaga keuangan seperti dana pensiun, asuransi, dan reksa dana                                   | Saham institusi / Total saham beredar                                             | Jackson et al. (2022); Athira & Lukose (2023) |
|                            | Kepemilikan Blok                               | Kepemilikan saham dalam jumlah besar ( $\geq 5\%$ ) oleh individu atau institusi tertentu                                             | Proporsi saham blockholder terhadap total saham                                   | Zhao & Chen (2022); Long et al. (2024)        |
|                            | Manajemen Laba (Akrua Diskresioner)            | Manipulasi pelaporan laba dengan menggunakan kebijakan akuntansi tertentu tanpa mengubah aktivitas riil                               | Model Modified Jones (Dechow et al., 1995)                                        | Subramanian & Gopalakrishnan (2024)           |
|                            | Manajemen Laba Riil (Real Earnings Management) | Penyesuaian aktivitas operasional untuk memengaruhi laba dilaporkan, seperti mempercepat penjualan atau mengurangi biaya diskresioner | Abnormal CFO, Abnormal Production Cost, dan Abnormal Discretionary Expense        | Lee & Park (2023); Delgado et al. (2023)      |

|                         |                          |                                                              |                             |                                         |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Variabel Kontrol</b> | Ukuran Perusahaan (Size) | Menggambarkan skala operasi perusahaan                       | Ln (Total Aset)             | Ghozali (2023); Chen et al. (2010)      |
|                         | Leverage                 | Tingkat penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan | Total Utang / Total Ekuitas | Frank et al. (2009); Hair et al. (2022) |

### Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda (*multiple linear regression*) untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Model analisis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1 INSOWN_{it} + \beta_2 INSTOWN_{it} + \beta_3 BLOCK_{it} + \beta_4 Dait + \beta_5 SIZE_{it} + \beta_6 LEV_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| ETR <sub>it</sub>     | : Penghindaran pajak perusahaan i pada tahun t      |
| INSOWN <sub>it</sub>  | : Kepemilikan internal                              |
| INSTOWN <sub>it</sub> | : Kepemilikan institusional                         |
| BLOCK <sub>it</sub>   | : Kepemilikan blok                                  |
| Dait                  | : Akrua diskresioner ( <i>proxy</i> manajemen laba) |
| SIZE <sub>it</sub>    | : Ukuran perusahaan                                 |
| LEV <sub>it</sub>     | : <i>Leverage</i>                                   |
| $\epsilon_{it}$       | : <i>Error term</i>                                 |

Sebelum melaksanakan analisis regresi, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), sehingga hasil estimasi dapat diandalkan secara statistik. Proses pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics, yang berfungsi untuk menguji hipotesis secara kuantitatif melalui perhitungan parameter model dan tingkat signifikansi yang diperoleh dari hasil estimasi.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Hasil Penelitian

**Tabel 2. Sampel Penelitian**

| Kriteria                                                                                 | Jumlah Perusahaan |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018–2020                           | 146               |
| 2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dan laba bersih lengkap selama 2018–2020 | 40                |
| 3. Data observasi penelitian selama tiga tahun (2018–2020)                               | 200               |
| <b>Total Sampel</b>                                                                      | <b>200</b>        |
| <b>Sumber:</b> Bursa Efek Indonesia (BEI)                                                |                   |

Tabel 2 menyajikan ringkasan proses dan kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian. Berdasarkan kriteria purposive sampling yang telah ditentukan, diperoleh 200 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2020. Seluruh perusahaan tersebut memenuhi persyaratan kelengkapan data, yaitu telah mempublikasikan laporan keuangan auditan serta laporan laba rugi tahunan secara konsisten

selama tiga tahun pengamatan. Data yang dikumpulkan bersifat panel (time series-cross section), sehingga memungkinkan analisis dengan perspektif longitudinal untuk menilai dinamika perilaku keuangan dan praktik perpajakan perusahaan dari waktu ke waktu.

**Tabel 3. Statistik Deskriptif**

| Variable                              | N   | Minimum | Maximum | Mean    | Standard Deviation |
|---------------------------------------|-----|---------|---------|---------|--------------------|
| ETR (Effective Tax Rate)              | 200 | -0.78   | 0.76    | 0.2067  | 0.1638             |
| INSOWN (Insider Ownership)            | 200 | 0.00    | 0.26    | 0.0289  | 0.0577             |
| INSTOWN (Institutional Ownership)     | 200 | 0.00    | 0.98    | 0.6435  | 0.1908             |
| BLOCK (Blockholder Ownership)         | 200 | 0.02    | 0.67    | 0.2733  | 0.1605             |
| DA (Discretionary Accruals)           | 200 | 8.39    | 13.14   | 11.3565 | 0.9000             |
| SIZE (Firm Size - Ln Total Assets)    | 200 | 11.25   | 15.88   | 13.2264 | 0.8752             |
| LEV (Leverage - Debt to Equity Ratio) | 200 | 0.07    | 2.56    | 0.9268  | 0.4389             |

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 3 menunjukkan karakteristik statistik deskriptif dari seluruh variabel penelitian. Nilai Effective Tax Rate (ETR) berkisar antara -0.78 hingga 0.76 dengan rata-rata 0.207. Nilai negatif mengindikasikan adanya perusahaan yang memperoleh restitusi pajak atau manfaat pajak tangguhan, sedangkan nilai positif menunjukkan beban pajak aktual yang relatif tinggi. Variasi ETR ini mencerminkan perbedaan strategi penghindaran pajak di antara perusahaan sampel. Kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata 64,35%, yang menunjukkan dominasi lembaga keuangan dalam struktur kepemilikan perusahaan Indonesia. Sementara itu, kepemilikan internal relatif rendah, rata-rata hanya 2,89%, menunjukkan bahwa manajemen cenderung memiliki porsi saham yang kecil. Kepemilikan blok memiliki rata-rata 27,33%, menandakan adanya konsentrasi kepemilikan signifikan yang berpotensi memengaruhi keputusan strategis perusahaan. Nilai akrual diskresioner (DTAC) memiliki rata-rata 11,36 dengan standar deviasi 0,9, menunjukkan adanya variasi moderat dalam praktik manajemen laba antar perusahaan. Secara keseluruhan, statistik deskriptif ini menggambarkan keragaman struktur kepemilikan dan strategi pengelolaan laba yang berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak.

#### 4.2 Analisis Regresi

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 0,099 atau 9,9%, yang berarti bahwa variabel independen dalam model (struktur kepemilikan dan manajemen laba) mampu menjelaskan 9,9% variasi penghindaran pajak (ETR). Sisanya sebesar 90,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti karakteristik industri, kebijakan fiskal, atau faktor makroekonomi. Meskipun nilai  $R^2$  relatif kecil, hal ini umum terjadi dalam penelitian sosial dan keuangan yang melibatkan banyak faktor eksternal yang sulit dikontrol.

Hasil uji F menunjukkan nilai F-statistik sebesar 6,452 dengan tingkat signifikansi  $p < 0,05$ , yang berarti bahwa variabel kepemilikan internal, kepemilikan institusional, kepemilikan blok, dan akrual diskresioner secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, model regresi secara keseluruhan layak digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

**Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

| Variable | Unstandardized Coefficients (B) | Std. Error    | Standardized Coefficients (Beta) | t-Statistic | Sig. (p-value) | Keterangan        |
|----------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| Constant | 593,379.872                     | 1,238,997.755 | —                                | 0.479       | 0.633          | Tidak Ssignifikan |
| INSOWN   | -3,243,373.713                  | 1,456,784.446 | -0.270                           | -2.226      | 0.027          | Ssignifikan       |

|                                             |               |               |        |        |       |                   |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------|-------|-------------------|
| (Insider Ownership)                         |               |               |        |        |       | (-)               |
| <b>INSTOWN</b><br>(Institutional Ownership) | 150,543.865   | 1,224,462.929 | 0.034  | 0.123  | 0.902 | Tidak Ssignifikan |
| <b>BLOCK</b><br>(Blockholder Ownership)     | 1,019,945.402 | 1,209,571.794 | 0.215  | 0.843  | 0.400 | Tidak Ssignifikan |
| <b>DTAC</b><br>(Discretionary Accruals)     | -450,431.545  | 746,634.565   | -0.041 | -0.603 | 0.547 | Tidak Ssignifikan |
| <b>SIZE</b> (Firm Size)                     | 272,115.680   | 125,893.315   | 0.118  | 2.162  | 0.032 | Significant (+)   |
| <b>LEV</b> (Leverage)                       | -810,224.479  | 362,521.108   | -0.132 | -2.236 | 0.026 | Ssignifikan (-)   |

Dependent Variable: TAXAV (Tax Avoidance / Effective Tax Rate)

$R^2 = 0.134$  Adjusted  $R^2 = 0.099$  F-statistic = 6.452 Sig. (F) = 0.000

Sumber: Hasil olahan data dengan SPSS (2024)

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1. Pengaruh Kepemilikan Internal terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan internal berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar  $p = 0,027$ , sehingga Hipotesis 1 diterima. Temuan ini memperkuat argumentasi yang menyatakan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan Teori Keagenan (Jensen & Meckling, 1976) kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan, sehingga menurunkan perilaku oportunistik, termasuk dalam bentuk penghindaran pajak agresif.

Kepemilikan internal mendorong manajer untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam praktik pelaporan keuangan dan perencanaan pajak, karena mereka turut menanggung risiko atas kebijakan yang diambil. Temuan ini sejalan dengan studi empiris di Asia yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan internal tinggi cenderung menerapkan kebijakan pelaporan dan perencanaan pajak yang konservatif serta berorientasi jangka panjang (Wongsinhirun et al., 2024).

Implikasi dari hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan internal memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dengan memperkuat akuntabilitas manajerial. Ketika manajer memiliki kepentingan finansial langsung terhadap kinerja perusahaan, mereka cenderung menghindari strategi penghindaran pajak berisiko tinggi yang dapat menimbulkan sanksi atau merusak reputasi perusahaan. Dengan demikian, peningkatan kepemilikan internal dapat dipertimbangkan sebagai salah satu mekanisme tata kelola yang efektif untuk menekan praktik penghindaran pajak yang tidak etis.

#### 4.3.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis, kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai  $p = 0,902$ , sehingga Hipotesis 2 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa peran investor institusional dalam menekan praktik penghindaran pajak tidak sepenuhnya efektif di konteks Indonesia.

Ketidaksignifikanan ini dapat dijelaskan oleh keragaman karakter institusi yang berinvestasi di pasar Indonesia. Sebagian investor institusional, seperti dana pensiun atau lembaga keuangan internasional, menerapkan prinsip tata kelola yang ketat dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Namun, sebagian lainnya, seperti reksa dana dengan horizon investasi jangka pendek, lebih fokus pada keuntungan portofolio daripada

pengawasan tata kelola (Martin & Moser, 2023). Hasil serupa ditemukan pada pasar Asia Tenggara, di mana kepemilikan institusional hanya efektif menekan penghindaran pajak bila lembaga tersebut memiliki keterlibatan aktif dalam pengawasan (Athira & Lukose, 2023). Oleh karena itu, dampak kepemilikan institusional terhadap strategi pajak perusahaan cenderung tidak seragam.

Selain itu, konteks kelembagaan di Indonesia yang masih berkembang juga dapat memengaruhi efektivitas tekanan tata kelola dari investor institusional. Dalam beberapa kasus, hubungan antara investor institusional dan manajemen bersifat kooperatif, bukan monitoring, sehingga peran kontrol menjadi lemah. Hal ini berbeda dengan temuan di pasar maju seperti Amerika Serikat atau Eropa, di mana tekanan dari investor institusional terbukti efektif dalam mengurangi praktik penghindaran pajak (Patel & Patel, 2024).

Dengan demikian, meskipun secara teoretis kepemilikan institusional diharapkan dapat memperkuat transparansi dan menekan praktik oportunistik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitasnya bergantung pada jenis, strategi investasi, dan tingkat keterlibatan institusi tersebut dalam tata kelola perusahaan.

#### **4.3.3. Pengaruh Kepemilikan Blok terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan blok memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak ( $p = 0,400$ ), sehingga Hipotesis 3 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan blockholder atau pemegang saham besar tidak selalu berimplikasi langsung pada pengurangan praktik penghindaran pajak.

Temuan ini mendukung pandangan beberapa penelitian yang menyatakan bahwa efektivitas pengawasan oleh *blockholder* sangat bergantung pada tingkat keterlibatan, orientasi, dan motivasi mereka dalam mengawasi manajemen (Thompson & Richter, 2024; Long et al., 2024). Blockholder aktif cenderung melakukan monitoring yang ketat terhadap manajemen demi menjaga nilai jangka panjang perusahaan, sedangkan blockholder pasif yang hanya berperan sebagai investor portofolio sering kali tidak terlibat dalam pengawasan kebijakan pajak. Di Indonesia, banyak blockholder merupakan entitas keluarga atau afiliasi bisnis yang memiliki hubungan dekat dengan manajemen. Hubungan yang bersifat kolusif ini dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan berpotensi memunculkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, konsentrasi kepemilikan tinggi tidak selalu identik dengan penguatan tata kelola dalam konteks pengelolaan pajak perusahaan.

#### **4.3.4. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba yang diprosikan melalui akrual diskresioner tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ( $p = 0,547$ ). Dengan demikian, Hipotesis 4 ditolak. Temuan ini bertentangan dengan ekspektasi awal yang berasumsi bahwa praktik manajemen laba akan berkorelasi positif dengan strategi penghindaran pajak. Secara umum, manajemen laba dilakukan untuk menyesuaikan pelaporan keuangan agar memenuhi target tertentu, misalnya pencapaian laba yang diharapkan oleh investor atau pihak eksternal lainnya. Namun, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tujuan manajemen laba di perusahaan manufaktur Indonesia tidak selalu berkaitan dengan penghindaran pajak, melainkan lebih berorientasi pada pelaporan kinerja dan stabilitas laba.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Clarkson dan Richardson (2023) yang menemukan bahwa hubungan antara manajemen laba dan penghindaran pajak bersifat ambigu dan kontekstual, tergantung pada lingkungan regulasi dan efektivitas sistem pengawasan fiskal. Dalam konteks Indonesia, perbedaan antara standar akuntansi (PSAK/IFRS) dan aturan perpajakan (UU PPh) menyebabkan manipulasi laba melalui akuntansi tidak selalu memberikan keuntungan pajak langsung.

Selain itu, pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang semakin ketat melalui

sistem e-audit dan pertukaran data antarlembaga dapat mengurangi peluang bagi perusahaan untuk menggunakan manajemen laba sebagai sarana penghindaran pajak. Dengan kata lain, regulasi perpajakan yang semakin transparan dan pengawasan digital yang meningkat dapat menjelaskan lemahnya hubungan antara kedua variabel tersebut.

Secara konseptual, hasil ini memperkuat argumen bahwa praktik penghindaran pajak dan manajemen laba, meskipun keduanya merupakan bentuk “earnings management”, tidak selalu berjalan beriringan. Strategi penghindaran pajak cenderung melibatkan perencanaan fiskal dan hukum, sedangkan manajemen laba berfokus pada presentasi laporan keuangan untuk tujuan pelaporan eksternal.

#### **4.3.5 Pengaruh Manajemen Laba Riil terhadap Penghindaran Pajak**

Selain manajemen laba akrual, penelitian ini juga menguji pengaruh manajemen laba riil terhadap penghindaran pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik manajemen laba riil tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia tidak secara aktif menggunakan manipulasi aktivitas operasional—seperti percepatan penjualan, peningkatan produksi, atau pengurangan pengeluaran diskresioner—untuk tujuan penghematan pajak. Temuan ini sejalan dengan Delgado et al. (2023) yang menyatakan bahwa manajemen laba riil sering dilakukan untuk tujuan pelaporan kinerja dan bukan untuk mengoptimalkan beban pajak. Di sisi lain, penelitian Lee dan Park (2023) menunjukkan bahwa pengaruh manajemen laba riil terhadap penghindaran pajak bersifat kontekstual, tergantung pada tekanan fiskal dan kebijakan insentif di masing-masing negara. Dengan demikian, hasil ini memperkuat pandangan bahwa strategi penghindaran pajak lebih banyak dikendalikan oleh perencanaan fiskal dan struktur kepemilikan daripada keputusan manajemen laba berbasis aktivitas riil.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan memainkan peran penting dalam memengaruhi perilaku penghindaran pajak, meskipun pengaruhnya berbeda-beda tergantung pada jenis kepemilikan. Kepemilikan internal terbukti efektif menurunkan tingkat penghindaran pajak, sementara kepemilikan institusional dan blok belum menunjukkan kontribusi signifikan. Di sisi lain, praktik manajemen laba tidak terbukti berpengaruh langsung terhadap penghindaran pajak, menandakan bahwa keputusan strategis terkait laba dan perpajakan dikelola secara terpisah oleh perusahaan.

Temuan ini menegaskan pentingnya memperkuat tata kelola perusahaan di Indonesia melalui peningkatan keterlibatan manajerial dan transparansi kepemilikan, serta memperluas penelitian lintas sektor dan periode untuk memahami lebih dalam dinamika hubungan antara struktur kepemilikan, manajemen laba, dan penghindaran pajak dalam konteks ekonomi berkembang.

### **5. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh struktur kepemilikan—yang terdiri atas kepemilikan internal, kepemilikan institusional, dan kepemilikan blok—serta manajemen laba terhadap tingkat penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2020. Melalui analisis regresi linier berganda dan serangkaian pengujian hipotesis, penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan utama yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Kepemilikan internal berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Keterlibatan manajer sebagai pemilik saham dapat menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dan pengelola perusahaan. Dengan demikian,

- kepemilikan internal berperan sebagai mekanisme tata kelola yang efektif dalam mengurangi perilaku oportunistik manajerial.
2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran investor institusional di Indonesia belum mampu berfungsi secara efektif sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Keragaman karakteristik investor institusional dan horizon investasi yang berbeda-beda dapat menyebabkan variasi dalam tingkat keterlibatan pengawasan.
  3. Kepemilikan blok tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Meskipun blockholder memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan strategis, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan mereka dalam pengawasan belum cukup untuk menekan praktik penghindaran pajak. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi di Indonesia yang sering kali bersifat keluarga atau afiliasi, sehingga potensi kolusi antara pemilik dan manajemen masih tinggi.
  4. Manajemen laba, yang diprosikan melalui akrual diskresioner, tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan di sektor manufaktur cenderung memanfaatkan manajemen laba untuk tujuan pelaporan keuangan, bukan sebagai sarana utama untuk menghindari pajak. Kompleksitas regulasi perpajakan dan sistem pengawasan yang semakin ketat juga menjadi faktor pembatas dalam memanfaatkan manajemen laba sebagai strategi penghindaran pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa struktur kepemilikan memiliki peran penting namun bervariasi dalam memengaruhi perilaku penghindaran pajak, sementara manajemen laba tidak secara langsung berkorelasi dengan strategi penghindaran pajak. Temuan ini memperkaya literatur tata kelola perusahaan di pasar berkembang dan memberikan bukti empiris baru dari konteks Indonesia.

Hasil penelitian ini menjelaskan hubungan antara kepemilikan internal dan perilaku penghindaran pajak. Temuan empiris mendukung pandangan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik keagenan dan mendorong perilaku yang lebih etis dalam pengelolaan pajak. Selain itu, hasil penelitian ini menekankan bahwa manajer dapat bertindak sebagai pelindung kepentingan perusahaan ketika mereka memiliki tanggung jawab langsung terhadap kinerja jangka panjang.

Dalam konteks pasar berkembang seperti Indonesia, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh tata kelola terhadap penghindaran pajak sangat bergantung pada tekanan eksternal dan konteks institusional yang berbeda dari negara maju.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat dan memperluas cakupan teori-teori tata kelola korporasi klasik dengan bukti empiris baru dari ekonomi yang sedang berkembang.

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat kebijakan pengawasan dan transparansi kepemilikan saham di perusahaan publik. Regulasi yang mendorong peningkatan kepemilikan manajerial dapat menjadi instrumen efektif untuk menekan praktik penghindaran pajak tanpa perlu menambah beban regulatif baru. Manajemen perusahaan perlu meningkatkan proporsi kepemilikan internal sebagai bagian dari strategi tata kelola. Selain itu, dewan komisaris harus memastikan bahwa blockholder berperan aktif dalam pengawasan dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Hasil penelitian ini memberikan wawasan bahwa perusahaan dengan kepemilikan manajerial tinggi cenderung memiliki risiko pajak yang lebih rendah. Oleh karena itu, investor institusional dapat menggunakan informasi struktur kepemilikan sebagai indikator untuk menilai integritas dan risiko pajak suatu perusahaan.

Beberapa keterbatasan perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil penelitian

ini. Pertama, ruang lingkup variabel penelitian masih terbatas pada struktur kepemilikan dan manajemen laba, sementara faktor-faktor lain seperti budaya organisasi, karakter industri, atau aktivitas internasional perusahaan belum diakomodasi. Variabel-variabel tersebut dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap perilaku penghindaran pajak.

Kedua, penelitian ini menggunakan data cross-sectional yang memberikan gambaran pada satu periode waktu tertentu. Meskipun memberikan nilai deskriptif yang kuat, pendekatan ini belum mampu menangkap dinamika perubahan strategi perpajakan dan praktik tata kelola secara longitudinal. Penelitian dengan data panel atau *time series* di masa depan dapat mengungkap tren yang lebih mendalam.

Ketiga, penelitian ini hanya mencakup perusahaan yang terdaftar di BEI sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke perusahaan non-publik atau entitas di negara lain dengan sistem perpajakan yang berbeda.

Keempat, pengukuran variabel seperti manajemen laba (dengan model akrual diskresioner) dan penghindaran pajak (dengan rasio *Effective Tax Rate*) memiliki keterbatasan metodologis. Ukuran-ukuran ini bersifat proksi yang mungkin belum menangkap keseluruhan kompleksitas praktik akuntansi dan fiskal perusahaan.

Untuk memperdalam pemahaman dan memperluas cakupan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

1. Menambahkan variabel baru seperti budaya korporasi, strategi pajak internasional, atau risiko industri untuk mengidentifikasi faktor-faktor non-keuangan yang memengaruhi penghindaran pajak.
2. Menggunakan data longitudinal (panel) untuk menganalisis hubungan kausal dan tren jangka panjang antara struktur kepemilikan, manajemen laba, dan penghindaran pajak.
3. Melakukan studi lintas negara (cross-country analysis) untuk membandingkan bagaimana kerangka regulasi dan budaya tata kelola memengaruhi perilaku pajak korporasi.
4. Mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan eksperimental, seperti wawancara dengan eksekutif atau analisis studi kasus, untuk menggali motivasi manajerial yang tidak tercermin dalam data kuantitatif.
5. Menerapkan teknik ekonometrika lanjutan, seperti *instrumental variable regression*, *fixed/random effect models*, atau *structural equation modeling (SEM)*, untuk mengatasi potensi masalah endogenitas antarvariabel.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi tersebut, penelitian di masa depan dapat memperkaya pemahaman terhadap interaksi kompleks antara tata kelola perusahaan, manajemen laba, dan strategi penghindaran pajak, tidak hanya dari sisi teoritis, tetapi juga dari aspek kebijakan dan praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan konseptual terhadap literatur mengenai tata kelola perusahaan dan perpajakan di negara berkembang. Dengan menyoroti peran struktur kepemilikan, manajemen laba, serta konteks regulasi Indonesia, hasil penelitian ini memperluas diskursus global tentang bagaimana mekanisme tata kelola memoderasi hubungan antara pelaporan keuangan dan strategi pajak korporasi.

Temuan ini juga menjadi landasan yang relevan bagi perumus kebijakan untuk menyeimbangkan antara pengendalian regulatif dan fleksibilitas kebijakan, agar perusahaan tetap terdorong untuk patuh pajak tanpa kehilangan insentif untuk tumbuh secara berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Amri, M. (2023). Managerial ownership concentration and corporate tax avoidance in developing countries. *Journal of Financial Reporting & Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2023-0122>
- Athira, A., & Lukose, P. J. (2023). Do common institutional owners' activisms deter tax avoidance? *Pacific-Basin Finance Journal*, 80, 102090. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2023.102090>
- Anderson, R., Mansi, S., & Reeb, D. (2019). Family ownership and firm performance: Evidence from the S&P 500. *Journal of Corporate Finance*, 59(3), 85–102. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2019.04.002>
- Carbone, E., Manzi, M. A., Cirillo, A., & Sciascia, S. (2025). Tax avoidance in family firms: A multi-level literature review. *Entrepreneurship Research Journal*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1515/erj-2024-0157>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Clarkson, P., & Richardson, G. (2023). Earnings management and tax avoidance: Unpacking the regulatory nexus. *Accounting and Business Research*, 53(2), 210–228. <https://doi.org/10.1080/00014788.2023.987654>
- Dakhli, A. (2023). CEO power and corporate tax avoidance in emerging economies: Does ownership structure matter? *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 14(5), 1127–1155. <https://doi.org/10.1108/JAEE-06-2023-0181>
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. *The Accounting Review*, 70(2), 193–225.
- Delgado, F., Fernández-Rodríguez, E., García-Fernández, R., Landajo, M., & Martínez-Arias, A. (2023). Tax avoidance and earnings management. *Financial Innovation*, 9, Article 19. <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00424-8>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman Publishing.
- Gaba, M., & Velte, P. (2024). Managerial ownership, agency conflicts, and corporate tax avoidance: Evidence from European firms. *Journal of Corporate Finance*, 82, 102685. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2024.102685>
- Guenther, D. A., & Young, D. (2018). Corporate tax changes and earnings management: Evidence from U.S. tax reforms. *Contemporary Accounting Research*, 35(3), 1720–1748. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12379>
- Guo, Y. Y., & Sapiei, N. S. (2024). The role of corporate governance on corporate tax avoidance: A developing country perspective. *Journal of Accounting in Emerging Economies*. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2023-0022>

- Hartmann, F., & Hassan, A. (2021). Insider ownership and tax conservatism in emerging markets. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 44, 100432. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2021.100432>
- Jackson, R., Markarian, G., & Gross, P. (2022). Institutional ownership, corporate governance, and tax avoidance: Evidence from global markets. *Journal of Business Finance & Accounting*, 49(7-8), 1203-1229. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12619>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kim, H., Park, J., & Lee, S. (2023). Insider ownership and corporate tax avoidance: Evidence from Asian markets. *Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics*, 30(2), 145-167. <https://doi.org/10.1080/16081625.2023.118230>
- Kolawole, J. S., & Igbekoyi, O. E. (2025). Unveiling stewardship theory: Emerging trends and future direction. *Journal of Business and African Economy*, 11(2), 95-112. <https://doi.org/10.56201/jbae.v11.no2.2025.pg95.112>
- Lee, D., & Park, Y. (2023). Real earnings management and tax avoidance across tax regimes. *International Journal of Accounting*, 58(2), 101622. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2023.101622>
- Li, X., & Zhao, J. (2024). Insider ownership, financial transparency, and tax planning: Evidence from emerging economies. *Accounting and Finance Review*, 64(1), 1-24. <https://doi.org/10.1111/acfr.12033>
- Lim, S. (2020). Tax avoidance, debt costs, and shareholder activism: Evidence from Korea. *Pacific-Basin Finance Journal*, 61, 101329. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101329>
- Long, W., Wu, H., Li, L., Ying, S. X., & Li, S. (2024). Mixed-ownership structure, non-state-blockholder coalition, and tax avoidance. *International Review of Financial Analysis*, 91, 102988. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102988>
- Martin, J., & Moser, W. (2023). The role of institutional investors in corporate tax behavior: Governance, incentives, and constraints. *Journal of Corporate Governance and Finance*, 42(4), 85-108. <https://doi.org/10.1016/j.cogf.2023.04.002>
- Modigliani, F., & Miller, M. (2018). Corporate income taxes and the cost of capital: A correction revisited. *American Economic Review*, 108(5), 1891-1910. <https://doi.org/10.1257/aer.20181122>
- Nguyen, V. T., Pham, L., & Tran, Q. (2024). Ownership structure, earnings management, and tax avoidance: Evidence from emerging markets. *Journal of International Accounting Research*, 23(1), 45-68. <https://doi.org/10.2308/jiar-2023-052>
- Patel, A., & Patel, S. (2024). Institutional investors and corporate transparency: Implications for tax avoidance. *International Review of Financial Analysis*, 89, 102347. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.102347>
- Riedl, A., & Selim, A. (2024). Tax aggressiveness under concentrated ownership. *Finance Research Letters*. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105541>
- Simmons, R., & Nejadmalayeri, A. (2023). Blockholder monitoring and earnings management: A cross-country analysis. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 38(1), 78-101. <https://doi.org/10.1177/0148558X211055874>
- Subramanian, R., & Gopalakrishnan, V. (2024). Earnings management and tax avoidance: Global perspectives under regulatory scrutiny. *Accounting Forum*, 48(2), 135-159. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2024.03.002>
- Tandean, I. S., & Winnie, T. R. (2024). The role of corporate governance in mitigating tax avoidance. *Journal of Governance Research*, 13(4). <https://doi.org/10.22495/jgrv13i4siart2>

- Thai, H. M., Dang, K. N., Mohd Nor, N., & Nguyen, H. T. (2023). Corporate tax avoidance and stock price crash risk. *International Journal of Emerging Markets*, 20(1), 1–25. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-11-2021-1767>
- Thompson, G., & Richter, L. (2024). Active versus passive blockholders and corporate tax strategies: Evidence from global data. *Journal of Business Ethics*, 189(2), 355–376. <https://doi.org/10.1007/s10551-024-05322-9>
- Velte, P. (2023). Ownership structure and corporate tax avoidance: A structured literature review on archival research. *Journal of Applied Accounting Research*, 25(3), 696–731. <https://doi.org/10.1108/JAAR-10-2022-0259>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a positive theory of the determination of accounting standards. *The Accounting Review*, 53(1), 112–134.
- Wongsinhirun, N., Chatjuthamard, P., Chintrakarn, P., & Jiraporn, P. (2024). Tax avoidance, managerial ownership, and agency conflicts. *Finance Research Letters*, 61, 104937. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104937>
- Zhao, L., & Chen, Y. (2022). Blockholder influence and corporate tax planning: The moderating role of managerial discretion. *Accounting Research Journal*, 35(4), 578–594. <https://doi.org/10.1108/ARJ-07-2021-0153>
- .